



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



No. Koreksi : 348

Nomor : 503/462/DPMPTSP/2020
Tanggal : 26/06/2020

Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
Tentang : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Jumarawan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CNAJ 26/06/2009:57



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALU
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JA
OPD PEMRAKARSA	h

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>HR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>h</i>



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Kepala Dinas selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala Dinas dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan terhadap barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status pengguna barang milik daerah dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU TAHUN 2020

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Keterangan
1	02.03.01.05.01	Sepeda Motor New Smash Velg Racing / No. Rangka MH8BE4DFA7330177 / No. Mesin E451-ID-328976/ DN 4641 A / Tahun 2007	1 Unit	Rp. 12.500.000	RIAMANTI ESRA UNSO,S.Sos
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor New Smash Velg Racing / No. Rangka MH8BE4DFA7J318782 / No. Mesin E451-ID 319217 / DN 4417 A / Tahun 2007	1 Unit	Rp. 14.265.000	Hj. KASMAWATI, SH,M.Si
3	02.03.01.05.01	Sepeda Motor New Shogun Double Cakram / No. Rangka MH8FD125R7J1984488 / No. Mesin F404-ID-198603 / DN 3269 A / Tahun 2007	1 Unit	Rp. 12.500.000	KASRIA, S.Sos., M.AP
4	02.03.01.05.01	Sepeda Motor New Shogun Double Cakram / No. Rangka MH8FD125R7J198187 / No. Mesin F404-ID-198116 / DN 3268 A / Tahun 2007	1 Unit	Rp. 14.265.000	JUMRAWAN
5	02.03.01.01.03	Station Wagon Toyota Kijang Innova / No. Rangka MHFXW42G6C2234865 / No. Mesin 1TR7382006 / DN 1260 A / Tahun 2012	1 Unit	Rp. 252.200.000	EKA KOMALASARI,SE.Ak.,MM
6	02.03.01.01.03	Station Wagon Toyota Kijang Avanza / No. Rangka MHKM1CA4JDK052932 / No. Mesin F652RM-GMSFJ / DN 1755 I / Tahun 2013	1 Unit	Rp. 198.300.000	SITI RACHMI A.SINGI, S.Sos.,M.Si
7	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) Daihatsu Grand Max 1.3 D / No. Rangka MHKV3BA6JEK006204 / No. Mesin ME18212 / DN 1756 I / Tahun 2014	1 Unit	Rp. 156.500.000	MAKMUR, S.Sos
8	02.03.01.05.02	Scooter Honda Beat CBS F1 / No. Rangka MH1JFN11XEK113175 / No. Mesin JFN1E-1114590 / DN 3741 A / Tahun 2014	1 Unit	Rp. 14.791.000	SAIFUDIN
9	02,06,03,02,03	Tablet / Samsung / S/N. 358466/10/509058/4 /Tahun 2019	1 Unit	Rp. 17.250.000	EKA KOMALASARI,SE.Ak.,MM
10	02.06.03.02.02	Lap Top / Aser Aspier P3 / SNID:32970618176 / Tahun 2014	1 Unit	Rp. 10.000.000	SITI RACHMI A.SINGI, S.Sos.,M.Si
11	02.06.03.02.02	Lap Top / Aser / SNID:X44IU / Tahun 2019	1 Unit	Rp. 7.750.000	ROBI,S.Sos
12	02.06.03.02.02	Lap Top / Toshiba Satellite C800 / SNID:6C057024W / Tahun 2013	1 Unit	Rp. 5.000.000	RIAMANTI ESRA UNSO,S.Sos

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

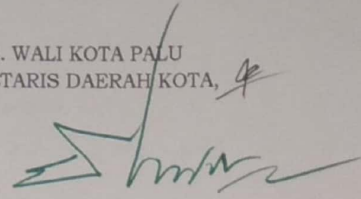
Sh

OPD
PEMRAKARSA


g

13	02.06.03.02.02	Lap Top / Lenovo V110-151SK / S/N:R900PV0UF / Tahun 2018	1 Unit	Rp. 7.500.000	JUMRAWAN
14	02.06.03.02.02	Lap Top / Lenovo G480 20156 / S/N: WB10250505 / Tahun 2013	1 Unit	Rp. 5.000.000	ANDI ERNAWATI B
15	02.06.03.03.12	Harddisk Eksternal / Toshiba / S/N: Z618P0OPTSAE / Tahun 2017	1 Unit	Rp. 800.000	ROBI,S.Sos

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH KOTA,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	